



Rp 500 Miliar Jadi Tagihan

JAKARTA, KOMPAS — Inspektorat DKI Jakarta berencana menagih Rp 500 miliar dana yang tidak dipertanggungjawabkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014. Penggunaan dana itu dinilai menyalahi prosedur, berpotensi merugikan keuangan negara, dan menjadi sebagian temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun, Senin (13/7), menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta tahun 2014 menemukan 70 kasus dan memberikan 313 rekomendasi dengan nilai sekitar Rp 500 miliar. Salah satu rekomendasinya adalah pengembalian uang negara.

Kesalahan pemakaian anggaran terjadi di banyak satuan dan unit kerja perangkat daerah (SKPD dan UKPD). Namun, penagihan akan dialamatkan ke 45 SKPD dan UKPD yang telah diaudit dan ditemukan kesalahan,

antara lain seluruh pemerintah kota administrasi, dinas dan suku dinas pendidikan, dinas pemadam kebakaran, pelayanan pajak, dan dinas komunikasi informasi.

"Dana itu harus dikembalikan karena dicairkan tidak sesuai peraturan, berpotensi pidana, dan merugikan keuangan daerah. Kami targetkan sekitar 80 persen atau Rp 400 miliar di antaranya dikembalikan ke kas daerah hingga akhir tahun ini," kata Lasro.

Penagihan itu sejalan dengan perbaikan atas sejumlah catatan BPK. Selain pengembalian uang, beberapa perbaikan juga ditempuh Pemprov DKI Jakarta 60 hari sejak sidang paripurna LHP Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/7). Hal itu, antara lain, melengkapi syarat laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sebagian catatan BPK dianggap muncul karena kelemahan dalam proses klarifikasi.

Dalam LHP Laporan Keuangan DKI Jakarta semester II-2014, BPK mencatat ada 2.909 temuan dengan 6.481 rekomendasi senilai Rp 2,65 triliun dan 6,6 juta dollar AS. Dari jumlah itu, 4.453 rekomendasi senilai Rp 565,26 miliar di antaranya ditindaklanjuti Pemprov DKI. Sebagian lain belum ditindaklanjuti, dan sebagian lainnya ditindaklanjuti, tetapi belum sesuai rekomendasi BPK.

BPK juga mencatat ada sejumlah belanja di 15 SKPD senilai Rp 268,8 miliar yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam laporan realisasi belanja operasi dan belanja modal Pemprov DKI. Ada pula catatan berupa realisasi bantuan operasional pendidikan berupa belanja pegawai Rp 294,1 miliar dan belanja barang jasa Rp 1,27 triliun, yang hanya berdasarkan data jumlah dana yang ditransfer ke sekolah dan tanpa rincian.

Catatan dan data yang tersedia dianggap tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai. Sistem pengendalian belanja modal pada Pemprov DKI juga belum memadai untuk mencegah terjadinya kecurangan serta pemahalan harga atau harga lebih tinggi dibandingkan semestinya. BPK menemukan pemahalan pada 85 paket pekerjaan pengadaan barang yang diindikasikan merugikan daerah senilai Rp 214,29 miliar, di antaranya mengandung unsur kecurangan senilai Rp 211,34 miliar.

Sebelumnya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman mengatakan, Pemprov DKI memiliki waktu 60 hari untuk menjawab hasil pemeriksaan itu. Selain potensi kerugian negara karena pelanggaran aturan, pemeriksaan juga menemukan beberapa catatan

terkait penyajian dan kelengkapan data pendukung laporan keuangan.

Gubernur mengancam

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memanggil satuan kerja/unit kerja yang diduga menyelewengkan dana APBD 2014. "Kami akan panggil dan kami minta kembalikan. Kalau tidak, kami bisa penjarakan. Kalau uangnya tidak jelas ke mana, pakai duit pribadi," katanya.

Pengembalian itu harus dilakukakan dalam waktu 60 hari sesuai tenggat yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI untuk memperbaiki laporannya. Jika dalam waktu 60 hari dana itu tidak dikembalikan, Basuki berencana melaporkan satuan kerja/unit kerja dengan sangkaan korupsi.

Basuki mengatakan, dirinya sudah bersikap keras dalam pengelolaan keuangan tahun 2013. Namun, masih ada saja satuan kerja/unit kerja yang bermain-main dengan anggaran tahun 2014. (MKN/FRO)